

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN YANG  
MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN  
BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*)  
DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH**

**Syarifudin, Sy\***  
**Dr. Danialsyah, S.H.,M.H\*\***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H\*\*\***

**ABSTRAK**

Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Simeulue telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*), Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipergunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah upaya preventif, upaya preventif serta upaya represif.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Penangkapan Ikan.**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LAW ENFORCEMENT AGAINST FISHERY ENTERPRISES WHO  
CARRY OUT FISHING USING EXPLOSIVES (DYNAMITE FISHING)  
IN THE SIMEULUE WATERS OF ACEH**

**Syarifudin, Sy\***  
**Dr. Danialsyah, S.H.,M.H\*\***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H\*\*\***

**ABSTRACT**

*The criminal act of using explosives in fishing that occurred in Indonesian waters, especially Simeulue waters, has violated the provisions as stipulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.*

*The problems in this thesis are what are the factors that cause criminal acts of using explosives by fisheries business actors in the waters of Simeulue Aceh, what is the criminal liability of fisheries business actors who catch fish using explosives (dynamite fishing), what are the obstacles and efforts to overcome fishing using using explosives (dynamite fishing) in the waters of Simeulue Aceh.*

*The research carried out was normative research and was supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Water and Air Police (Pol Airud) Simeulue Police. The data analysis used is qualitative data.*

*Based on the research results it is known that factors causing criminal acts of using explosives by fisheries business operators in Simeulue Aceh waters are economic factors, lack of public knowledge about the impact of using explosives in fishing, criminal liability of fisheries business actors who catch fish using explosives (dynamite fishing). is as regulated in Article 84 paragraph (4) of Law 45 of 2009 concerning Fisheries, punishable by a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah. It is understood that the obstacle to preventing fishing using explosives (dynamite fishing) in the waters of Simeulue Aceh is that there is limited information obtained, the patrol team in the field getting information cannot directly arrest the perpetrators of using explosives. Efforts to prevent criminal acts of using explosives in fishing are pre-emptive, preventive and repressive efforts.*

**Keywords: Accountability, Business Actors, Fishing..**

*\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

**KATA PENGANTAR**